



DETERMINAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA INSTANSI DI KABUPATEN ACEH BARAT

Nourmaliza

Pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat

nourmalizaliza639@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah pada instansi di Kabupaten Aceh Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh instansi di Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 29 instansi. Setiap instansi terdiri dari 3 (tiga) orang yang akan dijadikan responden yaitu Kepala instansi, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sehingga jumlah responden penelitian sebanyak 87 orang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil perolehan kuesioner dari responden penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) masing-masing variable independen tidak ada yang bernilai nol dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,835. Angka tersebut bermakna bahwa faktor kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah pada instansi di Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci: *Kompetensi, Pengendalian, Akuntansi, Pengelolaan Aset*

Abstract

This study aims to examine the factors that influence the management of regional assets agencies in West Aceh District. The unit of analysis in this study is all agencies in West Aceh District, amounting to 29 agencies. Each Agencies consists of 3 (three) persons who will be the respondent, namely Head of agencies, Finance Administration Officer, and Activity Technical Officer. Sources of data in this study using primary data that is the results of questionnaires obtained from Respondents research. While the technique of collecting Research data is done by technique of spreading of questionnaire. The analysis method used is Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that the regression coefficient (β) of each independent variable was not zero and the coefficient of determination (R^2) was 0,835. This figure means that the factors of human resource competence, internal control systems and accounting information systems either jointly or separately affect the management of regional assets in agencies in West Aceh District.

Keywords: *Competence, Control, Accounting, Management Assets*

A. PENDAHULUAN

Penerapan UU (Undang-undang) No. 23 Tahun 2014 serta UU No. 33 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengukur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu implikasi penting dari UU tersebut adalah pemberian kewenangan bagi daerah untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan asset daerah yang dimiliki sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun ternyata pengelolaan asset di daerah masih banyak mengalami kesulitan sehingga dinilai belum optimal. Permasalahan terkait pengelolaan asset daerah juga dialami oleh instansi pada Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan LHP BPK tahun 2018 ditemukan adanya kelemahan terkait pengelolaan asset yaitu penyajian kartu inventaris barang belum informatif, belum sepenuhnya asset daerah memiliki dokumen resmi, serta beberapa asset yang belum tercatat dalam laporan keuangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan asset daerah sulit diidentifikasi, hilangnya asset daerah yang belum dicatat seluruhnya di laporan keuangan serta timbulnya potensi permasalahan hukum pada asset yang tidak memiliki dokumen yang sah seperti sertifikat dan dokumen lainnya.

Selain itu, permasalahan asset daerah juga ditemukan pada data KIB (Kartu Inventaris Barang) seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1
Data KIB Aset Tetap Tanah

Data	Nilai
Data KIB: 810 tanah bersertifikat	Rp. 682.999.370.413,00
Data Kepala Bidang Aset: 242 tanah bersertifikat	Rp. 257.802.539.175,00

Sumber: LHP LKPD Aceh Barat TA 2018.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki 810 tanah dengan nilai Rp. 682.999.370.413,00. Berdasarkan data dan keterangan dari Kepala Bidang Aset diketahui tanah yang bersertifikat sebanyak 242 tanah dengan nilai sebesar Rp257.802.539.175,00. Sehingga tanah yang belum memiliki sertifikat sebanyak 568 unit bidang tanah sebesar Rp425.196.831.238,00.

Beberapa permasalahan yang telah disebutkan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti, kurang kompetennya pengurus/pengelola asset dalam menertibkan asset daerah, kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas asset daerah oleh kepala instansi, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam merekapitulasi dan menghimpun asset daerah kedalam laporan barang dan laporan keuangan.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka dapat dinilai bahwa pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dirasa belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah. Berdasarkan survey literature yang telah dilakukan, ditemukan tiga faktor yang diperkirakan mempengaruhi pengelolaan aset daerah. Faktor-faktor tersebut adalah; kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi.

Faktor pertama yang diperkirakan mempengaruhi pengelolaan aset daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Susilo, 2002: 3).¹ Oleh karena itu jelas bahwa peran SDM sangat penting dalam pengelolaan asset. Dalam mengelola SDM tersebut dapat dilakukan dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis pengelolaan aset.

¹ Susilo, M. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.

Faktor kedua yang diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan aset adalah sistem pengendalian intern. Maraknya kasus korupsi terkait aset tetap daerah menunjukkan SPI yang masih lemah. Untuk itu, setiap instansi pemerintah daerah harus membangun SPI yang andal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas.

Faktor ketiga yang diperkirakan dapat mempengaruhi pengelolaan aset adalah sistem informasi akuntansi. SIA merupakan suatu sumber daya teknologi dan modal dalam organisasi yang bertugas menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan transaksi (Christine, 2009).² Terkait pengelolaan aset, dengan diberlakukannya SIA, berarti setiap Kuasa Pengguna Barang diwajibkan untuk menguasai program aplikasi yang telah ditentukan, mulai dari input data, dan proses datanya. SIA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja, memudahkan data lebih akurat, dan kesesuaian input data dari Kuasa Pengguna Barang.

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap pengelolaan aset daerah pada instansi Kabupaten Aceh Barat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan instansi Aceh Barat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan daerah terkait pengelolaan aset daerah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada instansi Kabupaten Aceh Barat akan pentingnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pentingnya penerapan SPI, dan

² Christine, I. (2009). Pengaruh Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan pada Teknologi Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individual di PT. PLN (Persero) Distribusi Bali Area Pelayanan Gianyar. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

pentingnya menjalankan SIA dengan baik, sehingga jika hal itu semua diterapkan maka akan mudah dalam melakukan pengelolaan aset daerah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Secara sederhana pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu: adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif dan, pengawasan (*monitoring*).

Sholeh dan Rochmansjah (2010)³ menyatakan bahwa sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain: terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah; terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; pengamanan aset daerah; tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat dan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset adalah suatu usaha atau proses kerja dalam rangka mengatur dan mengendalikan pengurusan aset secara maksimal sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Susilo (2002: 3)⁴ Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya.

³ Sholeh, C., & H. Rachmansyah (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jakarta: Fokus Media.

⁴ Susilo, M. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.

Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi/perusahaan. Kompetensi dimaknai sebagai suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya untuk memberikan kerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu (Sutrisno, 2009).⁵

Jadi kompetensi dapat diartikan karakteristik dari seseorang yang memiliki: (1) keterampilan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya; (2) pengetahuan (*knowledge*), yaitu fungsi dari sikap manusia yang mempunyai dorongan dasar untuk ingin tahu, untuk mencapai penalaran dan untuk mengorganisasikan pengalaman; (3) kemampuan (*ability*), yaitu untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hutapea dan Thoha, 2008: 28).⁶ Ketiga karakteristik tersebut yang selanjutnya akan dijadikan sebagai indikator kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam hal ini adalah penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga pengelolaan keuangan berbasis akrual dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI pada pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Bastian (2006: 450)⁷ “sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan”. Romney (2006: 229)⁸ menyebutkan bahwa “pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.

Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva organisasi, dan meningkatkan efektivitas anggota organisasi sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

4. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2010)⁹ merupakan “suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunaannya”.

⁷Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

⁸ Romney, M. B. (2006). Accounting Information System. Edisi 9. Jakarta. Salemba Empat.

⁹ Bodnar, G. H. & W. S. Hopwood (2006). Accounting Information System. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education inc-Upper Saddle River.

⁵Sutrisno (2009). Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia.

⁶Hutapea, P. dan N. Thoha (2008). Kompetensi Plus. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Romney dan Steinbart (2012: 3)¹⁰ mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai “rangkaiannya dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk dan mendukung bagi sistem yang lebih besar, tempat mereka berada”.

Sistem informasi akuntansi didefinisikan Mulyadi (2008: 3)¹¹ sebagai “organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan organisasi. SIA juga didefinisikan oleh Widjajanto (2001)¹² sebagai kumpulan sumber daya manusia (SDM) beserta modal yang memiliki tugas dalam menyiapkan informasi keuangan dan informasi. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*).

C. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang tujuannya untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh instansi yang meliputi kantor, dinas dan badan yang ada di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 29 instansi. Setiap instansi terdiri dari 3 (tiga) orang yang akan dijadikan responden yaitu Kepala instansi, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

¹⁰Romney, M. B. & P. J. Steinbart (2009). *Accounting Information System*. USA: Cengage Learning.

¹¹ Mulyadi (2008). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat.

¹² Widjajanto, N. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil perolehan kuesioner dari responden penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data penelitian yaitu kuesioner yang telah diisi oleh responden dikuantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka. Selanjutnya setelah data diperoleh, langkah berikutnya menganalisis dan menguji hipotesis yang dilakukan melalui program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) (Sekaran, 2010).¹³

Penelitian ini merupakan penelitian sensus, sehingga tidak dilakukan pengujian signifikansi. Rancangan pengujian hipotesis dilakukan dua tahap, yaitu rancangan pengujian hipotesis secara bersama-sama dan rancangan pengujian hipotesis secara parsial.

Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen penelitian yang meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas, setelah itu juga dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian multikolinearitas, heterokedastisitas, dan normalitas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden terhadap variabel pengelolaan aset daerah (Y), kompetensi sumber daya manusia (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), dan sistem informasi akuntansi (X_3).

¹³ Sekaran, U. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New Jersey: John Wiley & Son.

Pengolahan data menggunakan software SPSS (Statistic Package for Social Science) versi 20 dan Microsoft Excel 2010. Statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut disajikan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian pada Tabel 2.

TABEL 2
Statistik Deskriptif

	Mean	Minimum	Maksimum
Pengelolaan Aset Daerah	4,15	3,74	4,62
Kompetensi Sumber Daya Manusia	4,10	3,89	4,72
Sistem Pengendalian Intern	4,17	3,67	4,60
Sistem Informasi Akuntansi	4,20	3,81	4,53

Sumber: Data primer diolah.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai mean merupakan nilai rata pada suatu variable, nilai minimum merupakan nilai terendah/terkecil dari deretan data dalam variable. Sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi/terbesar dari deretan data dalam variable.

2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian Validitas, berdasarkan hasil pengujian validitas, menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh dari masing-masing item variabel pengelolaan aset daerah (Y), kompetensi sumber daya manusia (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), dan sistem informasi akuntansi (X_3) seluruhnya berada di atas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi $> 0,367$) sehingga kuesioner yang digunakan dapat dinyatakan valid.

Pengujian Reliabilitas, berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui bahwa masing-masing instrumen dalam penelitian ini reliable (andal) karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,50 (Pengelolaan Aset Daerah 0,821; Kompetensi Sumber Daya Manusia 0,656; Sistem Pengendalian

Intern 0,736; Sistem Informasi Akuntansi, 0,702). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini layak untuk digunakan (reliable).

3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat bahwa data observasi berdistribusi secara normal dimana kurvanya adalah normal. Sementara dari grafik P-Plot dapat dilihat bahwa titik-titik bergerak menuju searah dengan garis linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini adalah linear.

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,660, sistem pengendalian intern sebesar 0,410, dan sistem informasi akuntansi sebesar 0,528, nilai tersebut bermakna bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen (nilai tolerance $> 0,10$). Sementara itu, nilai VIF dari variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 1,515, sistem pengendalian intern sebesar 2,439, dan sistem informasi akuntansi sebesar 1,894, nilai tersebut bermakna bahwa tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut.

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat dari grafik Scatterplot bahwa tidak ada pola tertentu pada grafik, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji dan menganalisis rumusan hipotesis dengan menggunakan model regresi linear berganda Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 3.

TABEL 3
Hasil Regresi

No.	Variabel	Koefisien Regresi (β)
1	Constan	1,188
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	0,573
3	Sistem Pengendalian Intern (X_2)	0,789
4	Sistem Informasi Akuntansi (X_3)	0,321

Berdasarkan hasil regresi tersebut didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,188 + 0,573X_1 + 0,789X_2 + 0,321X_3$$

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengelolaan Aset Daerah

Besarnya pengaruh secara bersama-sama dilihat dari perolehan nilai Koefisien Determinasi (R^2) yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian terhadap Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.

TABEL 4
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Keterangan	Nilai
R	0,914
R Square	0,835

Berdasarkan Tabel 4, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,914 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0,914. Artinya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi memiliki hubungan dengan pengelolaan aset daerah pada instansi Aceh Barat sebesar 91,4%.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,835, nilai tersebut mendekati angka 1 (satu), artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sisanya 1,65% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Aset Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah. Koefisien regresi (β_1) yang diperoleh sebesar 0,573 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 satuan skala interval maka akan diikuti oleh kenaikan pengelolaan aset daerah sebesar 0,573 satuan skala interval. Diperoleh hubungan yang positif kompetensi sumber daya manusia dengan pengelolaan aset daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia terkait pemahaman aset, maka semakin baik pengelolaan aset daerah pada SKPK Aceh Barat.

Secara teoretis, Susilo (2002:3)¹⁴ menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Sebagai pondasi bagi seluruh proses pengamanan dalam pengelolaan aset daerah, setiap instansi pemerintah daerah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang mendorong perilaku (*behavior*) positif dan manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong tersedianya seluruh pengelola aset daerah.

Sistem yang baik tidak akan ada artinya, jika tidak dapat berjalan dan tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap tugasnya.

¹⁴ Susilo, M. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya, karena manusia pelaksana merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintah dan manusia merupakan subjek dalam aktivitas pemerintah (Hamidah, 2014).¹⁵

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutawa (2014) yang membuktikan bahwa pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngawi. Penelitian Hamidah (2014) juga memberikan hasil yang serupa yaitu terdapat pengaruh yang positif kemampuan sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara. Dimana semakin baik kemampuan sumber daya manusia, maka pengamanan aset negara pun akan semakin baik. Kemudian hasil penelitian Simamora dan Halim (2012)¹⁶ juga membuktikan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Aset Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah. Koefisien regresi (β_2) yang diperoleh sebesar 0,789 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sistem pengendalian intern sebesar 1 satuan skala interval maka akan diikuti oleh kenaikan pengelolaan aset daerah sebesar 0,789 satuan skala interval. Diperoleh hubungan yang positif sistem pengendalian intern dengan pengelolaan

aset daerah. Hal ini berarti bahwa dengan semakin baiknya sistem pengendalian intern yang dijalankan dalam mengelola aset, maka akan semakin baik pengelolaan aset daerah yang dijalankan oleh pengelola aset pada SKPK Aceh Barat.

Mulyadi (2008:183)¹⁷ menyatakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Disamping itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Michel (2013)¹⁸ menyatakan bahwa pengawasan dalam pemerintahan memiliki fungsi utama untuk memberikan pelayanan prima kepada para pegawai yang dianggap bermasalah, mengawasi seluruh apa yang ada di daerahnya baik dari aset daerah sampai pada pengalokasian anggaran, serta disiplin pegawai yang selanjutnya mengadakan kroscek terhadap kebenaran adanya penyalahgunaan aset, baik yang diberikan oleh pemerintah daerah, kepada siapa saja yang menerima aset tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agustina (2015)¹⁹ yang

¹⁵ Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia terhadap Pengamanan Aset Negara. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

¹⁶ Simamora, R., & A. Halim (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 47-61.

¹⁷ Mulyadi (2008). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat.

¹⁸ Michel, R. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset. Skripsi, Universitas Negeri Padang.

¹⁹ Agustina, A. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Aset Daerah dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan aset daerah. Hasil serupa juga dibuktikan oleh Hamidah (2014)²⁰ bahwa terdapat pengaruh yang positif penerapan SPIP terhadap pengamanan aset Negara. Dimana semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, maka pengamanan aset negara pun akan semakin baik. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian Asman, Akram, dan Alamsyah (2016)²¹ membuktikan bahwa pengawasan dan pengendalian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan, penggunaan ataupun pengamanan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengelolaan Aset Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah. Koefisien regresi (β_3) yang diperoleh sebesar 0,321 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sistem informasi akuntansi sebesar 1 satuan skala interval maka akan diikuti oleh kenaikan pengelolaan aset daerah sebesar 0,321 satuan skala interval. Diperoleh hubungan yang positif sistem informasi akuntansi dengan pengelolaan aset daerah. Hal ini berarti bahwa dengan baiknya sistem informasi akuntansi yang diterapkan aparatur dalam mengelola aset daerah, maka akan semakin baik pengelolaan aset daerah yang dilakukan pada SKPK Aceh Barat.

²⁰ Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia terhadap Pengamanan Aset Negara. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

²¹ Asman, A., H. Akram, & M. T. Alamsyah (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Asset*, 6(1), 23-38.

Suhadak dan Nugroho (2007:13)²² menyatakan bahwa jika tahap pelaksanaan pengelolaan aset daerah didukung dengan penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik, diharapkan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset daerah tidak akan menemui banyak masalah. Disamping itu, Mardiasmo (2002:115)²³ menjelaskan bahwa untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (termasuk laporan pengelolaan aset) yang baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah antara lain, menjaga aset melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Raharja, Pratiwi dan Wachid (2015)²⁴ yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan aset daerah pada Kabupaten Lamongan. Kemudian penelitian Hendrikus (2009)²⁵ juga memberikan hasil yang sama yaitu sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan aset di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta. Hasil tersebut membuktikan bahwa KPPN telah menyediakan peralatan computer beserta perangkat lunak ternyata dapat mendukung untuk mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan aset.

²² Suhadak & T. Nugroho (2007). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD*. Banyumedia Publishing: Malang.

²³ Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.

²⁴ Raharja, M., R. N. Pratiwi, & A. Wachid (2015). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 111-117.

²⁵ Hendrikus, S. B. (2009). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Akuntansi Pusat terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. *Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 10(2), 133-142.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini kepada aparatur pengelola aset pada instansi di kabupaten Aceh Barat, untuk selalu melakukan pengendalian fisik atas aset dan mengecek serta melakukan penghapusan aset dari daftar barang dan daftar inventarisasi. Aparatur pengelola aset pada instansi di kabupaten Aceh Barat juga diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya, aparatur pengelola aset pada instansi di kabupaten Aceh Barat juga harus dituntut untuk dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, serta dapat menghadapi setiap perubahan dalam organisasi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mempertimbangkan metode dalam pengambilan data, yaitu tidak hanya dengan menggunakan kuesioner akan tetapi juga menggunakan metode wawancara sehingga data yang diperoleh bisa lebih akurat. Saran selanjutnya yaitu, untuk menambahkan unit analisis tidak hanya dari satu wilayah instansi saja, namun lebih luas lagi misalnya instansi di Kabupaten/Kota di Aceh atau di Indonesia. Selain itu juga bisa dibandingkan antar daerah, baik di Provinsi Aceh, maupun di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Aset Daerah dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Asman, A., H. Akram, & M. T. Alamsyah (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Asset*, 6(1), 23-38.

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Bodnar, G. H. & W. S. Hopwood (2006). *Accounting Information System*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education inc-Upper Saddle River.

Christine, I. (2009). Pengaruh Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan pada Teknologi Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individual di PT. PLN (Persero) Distribusi Bali Area Pelayanan Gianyar. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia terhadap Pengamanan Aset Negara. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Hendrikus, S. B. (2009). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Akuntansi Pusat terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. *Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 10(2), 133-142.

Hutapea, P. dan N. Thoha (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.

- Michel, R. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset. Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Mulyadi (2008). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Raharja, M., R. N. Pratiwi, & A. Wachid (2015). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 111-117.
- Romney, M. B. & P. J. Steinbart (2009). *Accounting Information System*. USA: Cengage Learning.
- Romney, M. B. (2006). *Accounting Information System*. Edisi 9. Jakarta. Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New Jersey: John Willey & Son.
- Sholeh, C., & H. Rachmansyah (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta: Fokus Media.
- Simamora, R., & A. Halim (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 47-61.
- Suhadak & T. Nugroho (2007). Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD. Banyumedia Publishing: Malang.
- Susilo, M. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPF.
- Sutrisno (2009). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Widjajanto, N. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.